



**Tanggung, Digdaya dan Mandraguna:  
RELEVANSI PENINGKATAN KUALITAS  
MANUSIA INDONESIA**

**Oleh: Sri-Edi Swasono Nitidiningrat**

Disampaikan dalam rangka Dies Natalis UNY ke-52

Yogyakarta, 14 Mei 2016

## Pengantar (lihat hlm. 1)

- *"...Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan...dengan persatuan kita maksud per-satuan bangsa, satu bangsa yang tidak dapat di-bagi-bagi... dan kalau datang ma-ra--bahaya yang menim-pa pergerakan, di sanalah tempat kita menun-juk-kan persatuan hati, di sanalah kita harus berdiri sebaris...kita menyusun 'per-satuan'...kita me--nolak 'per-sa-téan'...". (Mohammad Hatta, Daulat Ra'jat, 20 April 1920).*

- Pancasila adalah “asas bersama”. Pancasila sebagai penyebut yang sama (*common denominator*) mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan. Dengan kata lain pancasila adalah “kesatuan hati”, sebagai ruhnya bangsa Indonesia, yang multi-etnikal dan multi-kultural, penuh keanekaragaman ini. Ibarat  $\frac{1}{2}$  tidak akan terjumlahkan dengan  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$  menjadi satu kesatuan utuh manakala ketiganya tidak tertransformasikan dalam penyebut yang sama, yaitu  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{6}{12}$ ,  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{4}{12}$ , dan  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{3}{12}$ . Tanpa ruh atau penyebut yang sama maka “persatuan” hanya akan menjadi “persatean”. Pancasila mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan, tanpa masing-masing kehilangan keindahan khasnya. Dengan demikian Pancasila adalah eksistensialisme Indonesia.

- Pancasila mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan, artinya merubah divergensi *mindset* menjadi konvergensi, merubah perselisihan dan pertentangan, serta merubah eksklusivisme kelompok menjadi kedamaian dan ko-eksistensi, merubah potensi kekerasan kolektif SARA menjadi toleransi dan solidaritas. Selanjutnya Pancasila menjadi legitimasi keberadaan Indonesia.

... *lanjutan: Pengantar (lihat hlm. 1)*

- Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis universitas ini dengan tema *“Peningkatan Relevansi, Kualitas, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Menghadapi MEA”*, tentulah sangatlah menarik.
- Tema ini, dengan disadari atau tidak disadari, memberi kesan bahwa *“daya saing”* telah dipersepsikan sebagai ujung tombak untuk menghadapi MEA. Ini berarti secara kontra-diksional kita berbicara mengenai *“daya saing”* di dalam *“forum kerjasama”*. Tentulah hal ini sangatlah paradoksikal. Oleh karena itu kiranya diperlukan suatu penjelasan, pelurusan dan pemaknaan ulang tentang kontradiksi ini.

## Dimensi Budaya Peningkatan Kualitas SDM (lihat hlm. 2)

- Marilah kita *back-to-basics*. Cita-cita Kemerdekaan kita jelas, yaitu "...membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, men-cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..." (*Pembukaan UUD 1945*). Namun cita-cita kemerdekaan ini belumlah tercapai, bahkan telah terjadi berbagai kegagalan serius.

... *lanjutan*: Dimensi Budaya Peningkatan Kualitas SDM  
(lihat hlm. 2)

- Barangkali tepat untuk mengangkat makna cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana disebut di atas itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa tentulah bukan sekedar mencerdaskan otak bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah konsepsi budaya, bukan konsepsi biologis-genetika. Mencerdaskan kehidupan bangsa berkaitan dengan mening-katkan harkat martabat manusia, mengangkat derajat manusia-manusia Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang *dignified*, tidak servil, bertenaga-dalam, berketahanan nasional, berpekerti luhur, tangguh, digdaya dan mandraguna.

## Pembudayaan Pancasila (lihat hlm. 2)

- Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, perkataan Pancasila ada dua kali disebut, saya kutipkan: “...Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman Bab I Pasal I ayat (2)...”, dan “...Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...” (Bab II Pasal (2). Namun dalam Bab Kurikulum (Bab X) tidak terjabarkan bahkan tidak disebutkan perkataan “Pancasila”, meskipun secara eksplisit disebutkan sebagai tuntutan kurikuler perkataan-perkataan “iman”, “takwa, “akhlak mulia” dan “agama”, yang lalu terasa aneh bahwa “Pancasila” tidak termasuk sebagai tuntutan serupa. Artinya yang lebih menekankan pentingnya nilai-nilai agama daripada nilai-nilai kenasionalan (nasionalisme Indonesia).



... *lanjutan*: Pembudayaan Pancasila (lihat hlm. 3)

- Barangkali itulah yang menjadi sebab mengapa pembudayaan Pancasila makin sepi di ruang-ruang kelas kita. Lebih menyedihkan lagi bahwa di salah satu universitas terkemuka di Indonesia perkataan "Pancasila" tidak disebut dalam bab-bab dan pasal-pasal Statuta-nya. Saya harapkan hal ini bukan merupakan kelanjutan dari dihapuskannya P-4 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di awal Reformasi, yang mencerminkan suatu eforia politik murahan, yang secara "pop" menerima semangat "*the end of ideology*" liberalisme-nya Daniel Bell (1960-an) ataupun "*the end of history*"-nya Francis Fukuyama (1992) yang disanggah oleh Samuel Huntington dalam "*the clash of Civilizations*"-nya (1996), tanpa meneliti dari sudut relevansi ataupun irrelevansi, baik substansi maupun metoda penyelenggaraan P-4.

## Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Proklamasi Budaya (lihat hlm. 4)

- Dalam berbagai kesempatan saya telah menyampaikan versi budaya tentang makna “proklamasi kemerdekaan”. Bahkan telah saya singgung pula pada bab sebelumnya di depan. “Proklamasi kemerdekaan” di samping merupakan proklamasi politik, keberdaulatan dan ke-man-dirian Indonesia, suatu pernyataan menolak ketergantungan (menolak *onafhankelijkheid* – istilah Soekarno dan Hatta), proklamasi kemerdekaan adalah juga suatu “proklamasi budaya”. Berkehidupan yang cerdas adalah inti dari suatu bangsa yang telah merdeka.

## ... lanjutan: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Proklamasi Budaya (lihat hlm. 4)

- Dari “proklamasi budaya” ini lahirlah berbagai “tuntutan budaya”: yaitu tuntutan melepaskan budaya “keinanderan” sebagai bekas anak jajahan, yang semula tertuding sebagai kaum *Inlander*, yang semasa keterjajahannya berada di bawah kelompok kelas tertinggi yang disebut kaum *European* (bangsa Eropa) dan kelompok kelas menengah kaum *Vreemde Oosterlingen* (bangsa Timur Asing). Kaum *Inlander* adalah kelompok kelas terbawah yang lazim disebut sebagai kaum pribumi. Proklamasi Kemerdekaan sebagai proklamasi politik telah menghapus struktur kelas-kelas ini: “...tiap-tiap warga-negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan...” (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).

*... lanjutan: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa:  
Proklamasi Budaya (lihat hlm. 4)*

- “Proklamasi budaya” ini melahirkan “tuntutan budaya”, yaitu tuntutan untuk mampu berbudaya menjadi tuan di negeri sendiri, mampu menolak sekedar sebagai koelie di negeri sendiri, mampu merasa sepenuhnya berdaulat atas diri dan atas Ibu Pertiwi-nya, sadar akan makna mulia keberdaulatan dan berkemandirian<sup>1)</sup>, senantiasa mampu rukun di bawah Pancasila meningkatkan kadar kelangsungan-hidupnya secara bersinam-bungan<sup>2)</sup>.

## Keminderan: Kealpaan Menggariskan Strategi Budaya (lihat hlm. 5)

- Sangat disayangkan kita telah gagal melakukan *unlearning (afleren)*, gagal merubah *mindset*, untuk memenuhi berbagai “tuntutan budaya” (dan “tugas budaya”) fundamental sebagai bangsa yang merdeka dan mandiri ini. Kita telah lengah-budaya (*culturally ignorant*) tidak segera meng-gariskan “strategi budaya” sebagai keharusan bagi bangsa yang merdeka. Mestinya “budaya merdeka” ter-gariskan sebagai suatu keutamaan dalam proses formulasi strategi pembangunan nasional, untuk men-dorong proses *cultural unlearning* itu.

## MEA Tercemar Insting Kapitalisme Predatorik (lihat hlm. 6)

- Mengapa kita membaca Konstitusi kita dengan naluri ekonomi pasar atau kapitalisme, artinya dengan naluri “bersaing” dan bukan naluri “kerjasama” sesuai jiwa UUD 1945. Bangsa ini telah terseret oleh semangat bersaing yang dibawa oleh pasar-bebas neoliberalistiknya globalisasi. Ini merupakan suatu kemenangan ideologi kapitalisme untuk membentuk “*mindset* bersaing” ke seluruh pelosok dunia, sebagai kemenangan perang ideologi kapitalisme melalui *neocortical warfare*-nya liberalism dan kapitalisme. Dalam persaingan (*free-fight liberalism*) akan terjadi pertarungan, petarung-petarung yang kalah berguguran yang merupakan kerugian bagi sinergisme *socio-cultural forces*, menambah kelangkaan *human reputabilities*.

... *lanjutan*: MEA Tercemar Insting Kapitalisme Predatorik  
(lihat hlm. 7)

### *ASEAN Declaration 1967 dan ASEAN Charter 2007*

- Mari kita pahami baik-baik. *ASEAN Declaration 1967* menyatakan didirikannya Association for Regional Cooperation di antara negara-negara Asia Tenggara, yang dikenal dengan nama ASEAN, yang sebenarnya menegaskan paham kooperativisme (atau paham kerjasama). Butir-butirnya adalah hasrat untuk bersama-sama meningkatkan, memelihara, dan lebih meng-efektifkan kerjasama dalam bidang ekonomi (meliputi pertanian, industri dan perdagangan), sosial, budaya, pendidikan, teknologi dan adminis-trasi, dengan menjaga stabilitas sosial-ekonomi serta kedamaian. Ditegaskan pula bahwa cita-cita kerjasama ini dikatakan demi mencapai kemajuan progresif untuk mening-katkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dengan catatan khusus tetap menghor-mati kemerdekaan dan kedaulatan nasional masing-masing anggota.

... *lanjutan*: MEA Tercemar Insting Kapitalisme Predatorik  
(lihat hlm. 7)

- Sementara itu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter 2007*) menegaskan semangat kerjasama dengan butir-butirnya menguta-makan kepentingan bersama (*mutual interests*) dan saling keter-gan-tungan antar-rakyat dan negara-negara anggota ASEAN yang terikat oleh geografi, tujuan bersama dan nasib bersama disertai hasrat dan keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang memiliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejah-teraan bersama. Ditegaskan pula tujuan ini diangkat dengan menghormati persahabatan dan prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tanpa campur-tangan, konsensus, dan persatuan dalam keberagaman.



... *lanjutan*: MEA Tercemar Insting Kapitalisme Predatorik  
(lihat hlm. 8)

- *Judicial review* yang kami ajukan khususnya terhadap ASEAN Charter Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (n) yang jelas-jelas liberalistik dan kapitalistik, yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945<sup>3</sup>

(lihat hlm. 9)

- Pasal 1 ayat 5 ASEAN Charter yang membuka bebas arus barang jasa dan investasi termasuk arus penduduk, professional, buruh dan modal:
- *“Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara eko-nomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja ber-bakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”.*
- Pasal 2 ayat 2 huruf (n) yang mereduksi secara progresif ke arah penghapusan semua hambatan ekonomi sesuai tuntutan ekonomi pasar-bebas:
- *“Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah pengha-pusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar”.*

**... lanjutan: MEA Tercemar Insting Kapitalisme Predatorik  
(lihat hlm. 10)**

- Lebih dari itu, inkonsistensi internal pasal-pasal ASEAN Charter dapat kami kemukakan antara lain Pasal 2 ayat 2 huruf (a) yang mene-gaskan:
- *"...menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persa-maan, keutuhan kesatuan territorial dan identitas nasional seluruh Negara Anggota ASEAN..." ("...respect for the inde-pendence, sover-eignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States...").*

## Penutup (lihat hlm. 23)

### *Kepemimpinan ASEAN Harus Ditangan Indonesia*

- Indonesia harus kembali memimpin ASEAN dengan demikian dapat mengembalikan MEA, menegakkan dasar-dasar kerja-sama yang harus saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang selingkuh mengintip kelemahan pihak lain. Indonesia harus dapat menegaskan bahwa forum MEA adalah forum komplementaritas, artinya saling melengkapi kekurangan masing-masing anggota menjadi keutuhan sinergis dan memberikan keuntungan bersama.
- Indonesia tidak usah tergopoh-gopoh memajukan dan mengintensifkan kerjasama MEA, selama MEA tidak menguntungkan Indonesia. Anggota-anggota ASEAN sudah akan meramaikan dan mengintensifkan sendiri perdagangan MEA ke arah Indonesia karena nafsu mereka memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alam Indonesia, tidak terkecuali memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sebagai pangsa pasar negara-negara ASEAN, mereka memang telah menjadi rakus dan kapitalistik terhadap Indonesia.

... *lanjutan*: Penutup (lihat hlm. 24)

- Kaidah-kaidah penuntun kerjasama harus dipegang teguh, meliputi: (1). Saling menghormati; (2). Saling tolong-meno-long/du-kung-mendukung untuk saling memajukan; (3). Saling meleng-kapi/mem-ben-tuk komplemen-taritas; (4). Saling meng-untungkan/*win-win*; (5). Tidak merugikan mitra kerja-sama; (6). Saling melindungi dari ancaman/kerugian; (7). Saling menanggung be-ban/menanggung resiko bersama.
- Kerjasama komplementaritas sangat diperlukan. Kita bisa belajar dari Star Trek (Dr. Smith) yang tegas angkat bicara: "...*Greeting. I am pleased to see that we are different, may we together become greater than the sum of us. ....*".
- Indonesia harus bisa "say No" manakala Indonesia atau salah satu anggota dirugikan. MEA harus berjiwa kebersamaan, sama-sama maju, *win-win*, menghindari *zero-sum*.

*“Eine grosse Epoche hat das Jahrhundert geboren, aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlecht”* – Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805).

**SELESAI**

**TERIMAKASIH**